



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/KMK.010/2021
TENTANG
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK
SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235 /PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235 /PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1683);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN.
- PERTAMA : Menetapkan organisasi internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan.
- KEDUA : Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235 /PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
- KETIGA : Dalam hal organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan

NY



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Nomor 235 /PMK.010/2020 tentang Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan, penetapan organisasi internasional tersebut dapat dilakukan pencabutan.

- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
6. Organisasi Internasional yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

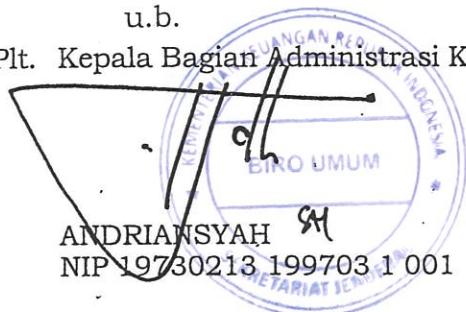
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

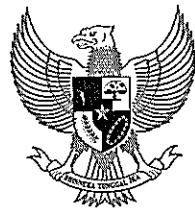
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



NY



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 16/KMK.010/2021
TENTANG ORGANISASI INTERNASIONAL YANG
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK
SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

I. Organisasi Internasional di bawah PBB

1. United Nations Resident Coordinator (UNRC)
2. United Nations Development Programme (UNDP)
 - a. International Atomic Energy Agency (IAEA)
 - b. International Civil Aviation Organization (ICAO)
 - c. International Telecommunication Union (ITU)
 - d. Universal Postal Union (UPU)
 - e. World Meteorological Organization (WMO)
 - f. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
 - g. United Nations Environment Programme (UNEP)
 - h. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)
 - i. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
 - j. International Maritime Organization (IMO)
 - k. World Intellectual Property Organization (WIPO)
 - l. United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
 - m. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)
 - n. United Nations Volunteer (UNV)
 - o. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
3. United Nations Population Fund (UNFPA)
4. United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO)
5. World Food Programme (WFP)
6. International Fund for Agricultural Development (IFAD)
7. World Bank
 - a. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
 - b. International Development Association (IDA)
8. International Monetary Fund (IMF)
9. Food and Agricultural Organization (FAO)
10. International Labour Organization (ILO)
11. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
12. United Nations Information Centres (UNIC)
13. United Nations Children's Fund (UNICEF)
14. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
15. World Health Organization (WHO)

41
P



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

II. Organisasi Multilateral Non PBB

1. World Trade Organization (WTO)
2. ASEAN Secretariat
3. ASEAN Centre for Energy (ACE)
4. The International Pepper Community (IPC)
5. International Coconut Community (ICC)
6. International Committee of the Red Cross (ICRC)
7. Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia (SOCSEA)
8. International Rice Research Institute (IRRI)
9. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)
10. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
11. Taipei Economic and Trade Office (TETO)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

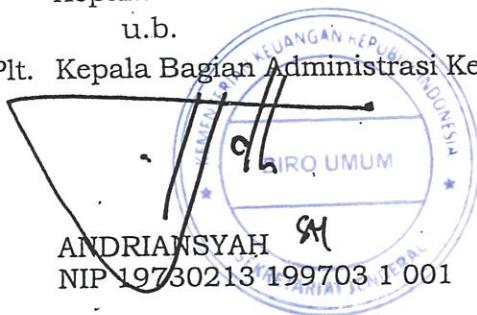
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



SM
MV